



LKIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan.

Laporan ini dibuat berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan berisikan pertanggung jawaban terhadap kinerja operasional dan kinerja pembinaan di lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur pelaksanaan pembangunan sektor perdagangan di Sumatera Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, merupakan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



HENNY YULIANI, S.IP, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 1979107082006042005

RINGKASAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja SKPD atas upaya pencapaian visi misi Dinas maupun dukungan terhadap visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertuang dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2025, melalui pencapaian tujuan, sasaran dan beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2024 ini telah dilaksanakan beberapa program / kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dan pada LKIP ini kami berusaha untuk menjelaskan pencapaian kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan program-program kegiatan tersebut dalam bentuk realisasi fisik maupun keuangan dengan keterangan pencapaian indikator keluaran/output dan hasil/outcome beserta dengan target pencapaian yang telah ditetapkan. Selain itu dalam upaya pencapaian sasaran kinerja, beberapa permasalahan yang dihadapi diupayakan untuk solusi penyelesaiannya.

Pencapaian Sasaran Kinerja

Di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan Satu (1) Tujuan dan Empat (4) Sasaran di sektor Perdagangan. Dalam Tahun 2023 ini Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang ada dengan pencapaian target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja dimaksud dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- Program Pengembangan Ekspor;
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;

Dalam hal pelaksanaan program-program tersebut melalui kegiatan maka harus didukung dengan data/informasi yang akurat baik di sektor perdagangan sebagai dasar dari perencanaan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain daripada itu bahwa pencapaian sasaran kinerja tersebut merupakan pencapaian sektor-sektor yang saling terkoordinasi dan bersinergi satu sama lain.

Kebijakan Pencapaian Sasaran

Untuk keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta terciptanya iklim usaha yang sehat
2. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman kualitas ekspor.

Palembang, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



HENNY YULIANTE, S.IP, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 1979107082006042005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Kinerja	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
I.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	9
I.4 Landasan Hukum	10
I.5 Sistematika LKIP 2024	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
II.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026	14
II.1.1 Visi dan Misi.....	14
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
II.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	17
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
III.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	24
III.1.2 Analisis Capaian Kinerja	26
III.1.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	47
III.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi	48
III.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	48
III.2 Realisasi Anggaran	51
III.2.1 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD Tahun 2024	51
III.2.2 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN Tahun 2024	72

	III.2.3 Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023	73
	III.2.4 Realisasi Program/Kegiatan APBN Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023	75
	III.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	76
BAB IV	PENUTUP	82
	IV.1 Kesimpulan	82
	IV.2 Saran/Masukan	83

DAFTAR TABEL

Tabel :

1. Tujuan – Sasaran – Indikator – Target Kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Program dan Kegiatan di Tahun 2024
5. Skala Penilaian
6. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
7. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2024
8. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
10. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB (Nasional) Menurut Lapangan Usaha (persen)
11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional
12. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Tahun 2024
13. Perkembangan Harga rata-rata sembilan bahan pokok masyarakat di Ibukota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024
14. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
15. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional
16. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen Tahun 2024
17. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
18. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional
19. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tahun 2024
20. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
21. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional
22. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen Tahun 2024
23. Realisasi Penerimaan Retribusi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Tahun 2023 – 2024
24. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
25. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Neraca Perdagangan, Pertumbuhan Ekspor, Pertumbuhan Ekspor Non Migas Tahun 2024

26. Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Tahun 2024
27. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
28. Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Periode 2022-2024
29. Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2024
30. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional
31. Realisasi Nilai Ekspor Sumatera Selatan berdasarkan 10 Komoditi Unggulan Tahun 2024
32. Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
33. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fluktuasi nilai impor Tahun 2024
34. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
35. Realisasi Nilai Impor Sumatera Selatan berdasarkan 10 Komoditi Unggulan Tahun 2024
36. Negara Asal Impor ke Sumatera Selatan Tahun 2024
37. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
38. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
39. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
40. Capaian Anggaran Program Kegiatan
41. Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2024
42. Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 dan 2024
43. Perbandingan Capaian Kinerja Dana APBN Tahun 2023 – 2024
44. Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBN Tahun 2023 – 2024
45. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
46. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

DAFTAR GRAFIK

Grafik :

1. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2024 - 2026
2. Grafik Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Periode 2022, 2023 dan 2024
3. Grafik Realisasi Keuangan Tahun 2023 dan 2024
4. Grafik Realisasi Fisik Tahun 2023 dan 2024

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP bagi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Provinsi Sumatera Selatan. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan straregis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang telah dilaksanakan.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

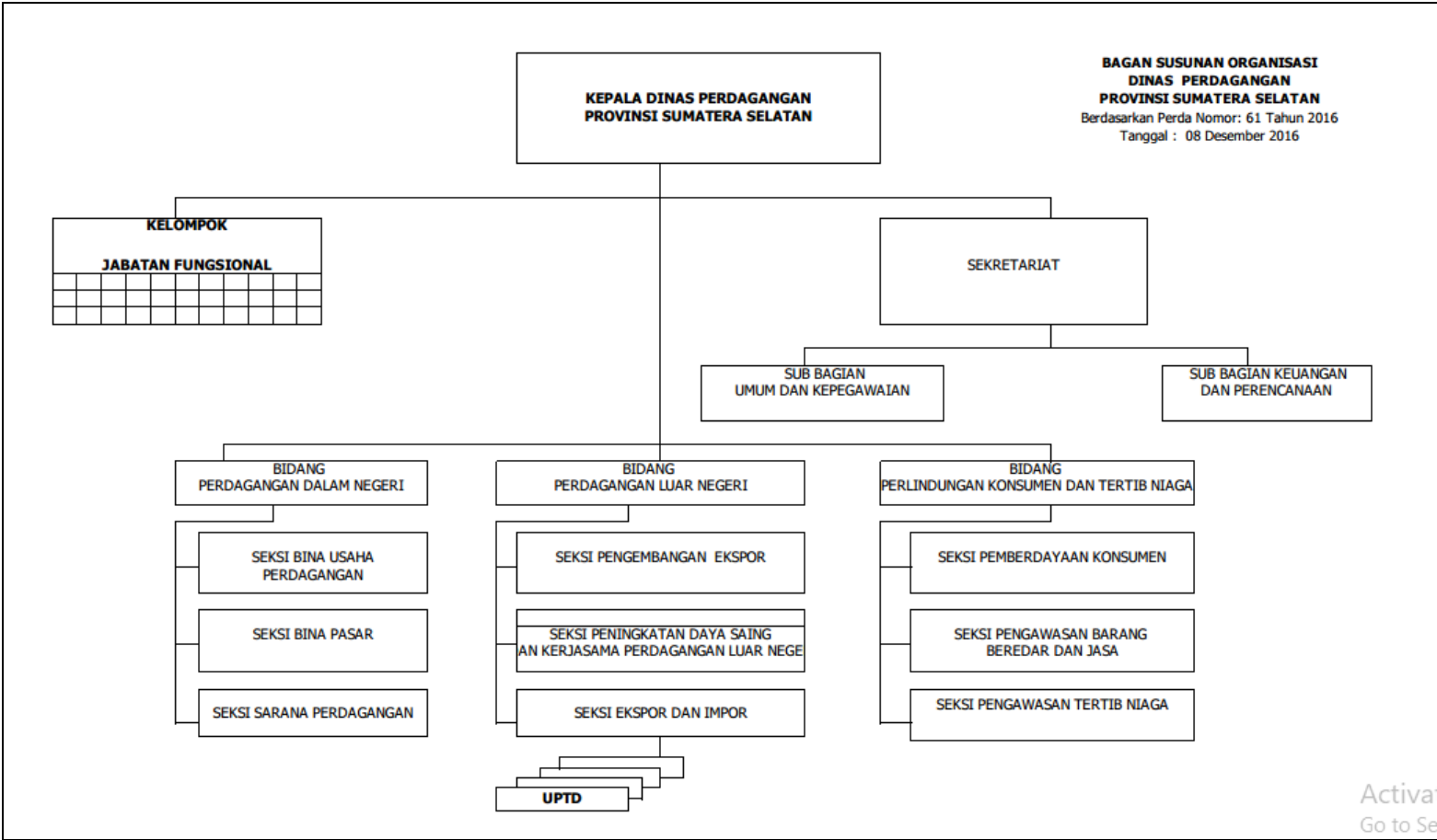
I.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1) Subbagian Keuangan dan Perencanaan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan
 - 2) Seksi Bina Pasar
 - 3) Seksi Sarana Perdagangan
- d. Bidang Perdagangan Luar Negeri yang membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Ekspor
 - 2) Seksi Peningkatan Daya Saing dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri
 - 3) Seksi Ekspor dan Impor
- e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Konsumen
 - 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - 3) Seksi Pengawasan Tertib Niaga
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) UPTD, yaitu :
 - 1. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
 - 1) Kepala UPTD
 - 2) Subbagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Pengujian dan Sertifikasi
 - 4) Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat terlihat dari gambar berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan



Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah : ***“melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan”***.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana dan Program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
2. Penyelenggaraan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta perizinan;
3. Penyelenggaraan kegiatan program sektor perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
4. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta organisasi/asosiasi dan dunia usaha di wilayah Provinsi;
5. Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Pemberian pembinaan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan;
8. Pelaksanaan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, kemetrologian dan tertib niaga;
9. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
10. Pembinaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan humas;
11. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Selain dari uraian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 juga

mengatur tugas pokok dan fungsi pejabat eselon II dan III seperti diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, sedangkan fungsinya sebagai berikut adalah :

- a. Penyusunan Rencana dan Program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. Penyelenggaraan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta perizinan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan program sektor perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta organisasi/asosiasi dan dunia usaha di wilayah Provinsi;
- e. Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. Pemberian pembinaan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- g. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan;
- h. Pelaksanaan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, kemetrolagian dan tertib niaga;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. Pembinaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan humas;
- k. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana dan program, penyusunan dan evaluasi, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian serta keuangan, sedangkan fungsinya :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, organisasi dan tatalaksana; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Kabupaten/Kota;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- h. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha Bidang;
- b. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor impor serta pengawasan mutu barang ekspor;
- c. Penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan daya saing dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
- c. Pelaksanaan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk memperkuat Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 12 Juli 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 yaitu : **Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB)** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan di bidang standarisasi dan pengawasan mutu barang;
- b. Menyusun dan mengembangkan sistem jaminan mutu untuk mencapai pemenuhan Standar Internasional (ISO-IEC 17025) dengan mempersiapkan dokumen mutu laboratorium;
- c. Melaksanakan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- d. Melaksanakan pengawasan mutu produk bertanda SNI;
- e. Melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka sertifikasi produk penggunaan tanda SNI;
- f. Melaksanakan pengawasan mutu barang yang beredar dipasaran baik produk dalam negeri maupun eks impor dalam rangka perlindungan konsumen;
- g. Melakukan pengawasan produk impor dalam rangka perlindungan produk lokal;
- h. Melaksanakan pengembangan serta penyusunan standar dan metode pengujian;
- i. Melaksanakan pelayanan jasa di bidang standarisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis pada dunia usaha dan masyarakat;
- j. Melaksanakan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;
- k. Memberikan bimbingan teknis di bidang mutu kepada dunia usaha dan masyarakat;
- l. Melaksanakan pelatihan di bidang teknis pengujian dan kalibrasi;
- m. Memberikan bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) kepada laboratorium penguji dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;

- n. Melakukan pengolahan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;
- o. Melakukan kegiatan analisa dan evaluasi data hasil pengujian serta data yang berkaitan dengan pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, dalam rangka terwujudnya perdagangan yang efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Dinas Perdagangan dalam mewujudkan perdagangan yang efisien baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dapat tercapai dengan didukung program kegiatan dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, menempatkan Dinas Perdagangan sebagai Perangkat Daerah yang strategis dalam lingkungan pemerintahan khususnya di sektor perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan Utama

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengembangan di sektor perdagangan, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Kendala tersebut ada yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Internal

- a. Pemahaman SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi OPD masih belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya kinerja pelayanan publik.
- b. Tugas pokok dan fungsi OPD yang dalam pendistribusiannya sudah dibagi per SDM aparatur masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjelasan lebih lanjut agar SDM aparatur mengerti tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

- c. Kemajuan teknologi aplikasi yang saat ini telah diimplementasikan ke dalam proses perencanaan, keuangan maupun pelaporan tidak diimbangi dengan penyediaan aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
- d. Belum terealisasinya secara baik pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik atau SOP (Standart Operation Procedure) di lingkungan OPD.
- e. Masih kurangnya kesempatan bagi SDM aparatur dalam meningkatkan kemampuan/kompetensinya terutama bagi SDM aparatur pembina di bidang teknis.
- f. Validasi dan ketersediaan data & informasi masih belum lengkap dan tertata dengan baik.
- g. Masih rendahnya aksi SDM aparatur dalam menyikapi isu-isu strategis saat ini seperti GRK (go green), MDG's, gender dan pengentasan kemiskinan, terutama pada implementasinya ke dalam program- kegiatan OPD.

b. Eksternal

- a) Komoditi ekspor Sumsel pada umumnya masih berupa produk primer sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal disamping produk-produk ekspor banyak tergantung pada musim.
- b) Masih sedikitnya jumlah industri hilir bagi komoditi unggulan Sumatera Selatan yang berorientasi ekspor.
- c) Belum tersedianya pelabuhan laut beserta infrastrukturnya yang memadai, sehingga untuk komoditi tertentu banyak dikapalkan melalui Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung, hal ini berdampak terhadap nilai ekspor Sumsel.
- d) Kurangnya informasi di luar negeri (akses pasar) untuk produk industri yang berpotensi ekspor, umumnya masih memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.

I.4 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
17. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

I.5 Sistematika LKIP 2024

Sistematika LKIP Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah :

I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- I.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- I.4. Landasan Hukum
- I.5. Sistematika LKIP 2024

II. PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026
 - II.1.1 Visi dan Misi
 - II.1.2 Tujuan dan Sasaran
- II.2 Rencana Kinerja Tahun 2024
- II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - III.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

- III.1.2 Analisis Capaian Kinerja
- III.1.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
- III.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
- III.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- III.2 Realisasi Anggaran
 - III.2.1 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD Tahun 2024
 - III.2.2 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN Tahun 2024
 - III.2.3 Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023
 - III.2.4 Realisasi Program/Kegiatan APBN Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023
 - III.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

IV. PENUTUP

- IV.1 Kesimpulan
- IV.2 Saran/Masukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam bentuk rencana tiga tahunan dengan penjabaran perencanaan pertahun untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Rencana Strategis ini juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kinerja SKPD dalam mendukung kinerja pemerintah daerah melaksanakan pembangunan.

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026, sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang akan diurai dalam bab ini.

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan berbagai pemangku kepentingan dan menjawab tuntutan perkembangan situasi saat ini baik tingkat regional maupun nasional serta secara global.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka dalam dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, strategi dan kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan indikator kinerja sasaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai sarana pencapaian.

II.1.1 Visi dan Misi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tekad melanjutkan pembangunan Sumatera Selatan untuk 3 (tiga) tahun kedepan melalui RPD tahun 2024 – 2026 berVISI

mewujudkan **“SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025”**, dengan 4 (empat) MISI antara lain :

- 1) Menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas; dan
- 4) Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

Dukungan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada pencapaian VISI MISI RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tersebut, terutama pada upaya pencapaian MISI pertama dalam rangka “Menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional”.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi untuk mendukung misi kelima Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tujuan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan adalah : **Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan
2. Meningkatnya Ekspor Non Migas Luar Negeri
3. Terkendalnya Keterjangkauan Harga
4. Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka disusun beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan melalui program-program disektor perdagangan. Secara keseluruhan perumusannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Tujuan – Sasaran – Indikator – Target Kinerja
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah		Neraca Perdagangan (juta US\$)	5.125	5.253	5.354
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku (%)	9%	10%	11%
		1.1 Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	1.1.1 Persentase penurunan pengaduan konsumen	0,05%	0,05%	0,05%
			1.1.2 Persentase penyelesaian permasalahan perselisihan konsumen	90%	90%	90%
			1.1.3 Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	70%	70%	70%
			1.1.4 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	100%	100%
		1.2 Meningkatnya Ekspor Non Migas Luar Negeri	1.2.1 Nilai Ekspor Non Migas Luar Negeri	5.637	5.777	5.921
			1.2.2 Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2,5 - 5 %	2,5 - 5 %	2,5 - 5 %
		1.3 Terkendalinya Keterjangkauan Harga	2.1.1 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	≤5 %	≤5 %	≤5 %
		1.4. Meningkatnya infrastruktur perdagangan	2.2.1 Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik	25%	25%	25%

II.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Penjabaran lebih lanjut dari rencana kinerja (performance plan) tersebut dalam bentuk target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan pada proses pengukuran keberhasilan setiap periode pelaksanaan. Rencana kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024, disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku (%)	%	9
		1.1. Terkendalinya Keterjangkauan Harga	1.1.1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤ 5
		1.2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	1.2.1. Persentase penyelesaian perselisihan konsumen	%	90
			1.2.2 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100
			1.2.2. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	70
			Neraca Perdagangan	juta US\$	5.125
		1.3. Meningkatnya Ekspor Non Migas Luar Negeri	1.3.1. Nilai Ekspor Non Migas Luar Negeri	juta US\$	5.637
			1.3.2. Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas	%	2,5 - 5
		1.4. Meningkatnya infrastruktur perdagangan	1.4.1. Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik	%	25

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2023, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Stabilitas harga barang	1.1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤ 5
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	2.1. Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90
		2.2. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	70
		2.3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100
3	Peningkatan kinerja ekspor	3.1. Neraca perdagangan	juta US\$	5.125
		3.2. Nilai ekspor non migas luar negeri	%	5.637

		3.3. Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	2,5 - 5
4	Meningkatnya infrastruktur perdagangan	4.1. Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik	%	25

Program-program yang dikerjakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Program dan Kegiatan di Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2		3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	11.155.972.192
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	100%	124.000.000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	55.000.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.000.000
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60.000.000
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani	100%	9.253.636.887
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 OB untuk 60 orang	8.134.296.887
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	925.040.000
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	194.300.000

	Iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	100%	3.580.000
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.580.000
	Iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Meningkat	100%	160.000.000
	8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	1 paket	160.000.000
	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	100%	621.578.705
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	25.000.000
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.393.360
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	30.000.000
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3650 Exemplar	15.000.000
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	492.185.345
	Vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100%	150.000.000
	14	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Kantor yang Disediakan	1 paket	50.000.000
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100.000.000
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	100%	353.179.600
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	296.176.600
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	50.000.000
	Viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100%	490.000.000

	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	180 Unit/Tahun (R4=11 unit, R2= 4 unit)	280.000.000
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	60.000.000
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Gedung	150.000.000
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Tertib Usaha	100%	50.000.000
	I	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	100%	50.000.000
	22	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan	50.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	452 unit	500.000.000
	I	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	452 unit	500.000.000
	23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	452 Unit	500.000.000
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	≤5%	200.000.000
	II	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	≤5%	200.000.000

	24	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	12 laporan	50.000.000
	25	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	150.000.000
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2,5 - 5%	279.730.000
	I	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan	3 kali	279.730.000
	26	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	170.000.000
	27	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	109.730.000
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		1). Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2). Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 3). Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	1). 90% 2). 100% 3). 70%	730.700000
	I	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	455.700.000
	28	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	455.700.000
	Ii	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	225.000.000
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1 Dokumen	100.000.000

	30	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 Sertifikat	100.000.000
	31	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Potensial yang Dipantau	3 produk	25.000.000
	III	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	30%	50.000.000
	32	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	12 Laporan	50.000.000
Jumlah					12.916.402.192

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

III.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{\text{PRTC}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{\text{PRTC}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Tabel 5. Skala Penilaian

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

III.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis diperoleh capaian kinerja tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	1.1. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Sumsel	%	9	7,42	82,44
1.1	Terkendalinya Keterjangkauan Harga	1.1.1 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	<5	6,13	81,57
1.2	Meningkatnya perlindungan konsumen dan Pengawasan Perdagangan	1.2.1 Persentase penyelesaian permasalahan perselisihan konsumen	%	90	$80/84 \times 100 = 95,24$	95,24
		1.2.2 Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	70	$70/302 \times 100 = 23,18$	23,18
		1.2.3 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100	$57/59 \times 100 = 96,61$	96,61
		1.2. Neraca Perdagangan	US\$ jt	5.125	4.625,89	90,26%
1.3	Meningkatnya Ekspor Non Migas Luar Negeri	1.3.1 Nilai Ekspor Non Migas	US\$ jt	5.637	6.264,94	111,14%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		1.3.2 Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	2,5-5	2,33	93,2
1.4	Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan	1.4.1 Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik	%	25	25	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2024 telah mencapai targetnya. Tetapi ada beberapa indikator yang belum bisa tercapai yaitu persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan realisasi 23,18% dan capaian 23,18%, Pertumbuhan nilai ekspor non migas dengan realisasi 2,33 dan capaian 93,2%.

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian tujuan serta target dan capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	%	9	7,42	82,44

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya investasi, industri dan perdagangan guna mencapai tujuan meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah.

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 7,42 persen, realisasi capaian 82,44% dari target yang ditetapkan yaitu 9 persen. Nilai pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Tahun 2024 tidak mencapai target, hal ini disebabkan di tahun 2024 ini masih dalam pemulihan ekonomi dan juga dipengaruhi oleh

daya beli masyarakat yang seiring meningkat akibat telah berakhirnya Pandemi *Covid-19* sehingga cukup efektif dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat.

Sektor PDRB perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Tahun 2024 berkontribusi sebesar 7,42% pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari berbagai sektor. Hal ini menunjukkan roda perekonomian kembali bergerak hampir merata di semua sektor ekonomi.

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III- 2024 Terhadap Triw II- 2024 (q-to-q)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw III- 2024 (q-to-q)	Triw III- 2024 Terhadap Triw III- 2023 (y-on-y)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw IV- 2023 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,21	-12,54	2,58	2,39	2,59	0,42
B. Pertambangan dan Penggalan	8,27	-5,15	3,52	4,71	3,33	0,76
C. Industri Pengolahan	0,52	1,36	4,09	3,91	4,39	0,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,28	0,64	9,01	7,94	8,48	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01	2,86	2,16	3,27	2,66	-0
F. Konstruksi	0,64	2,97	5,49	4,04	5,89	0,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,54	2,18	7,33	7,88	7,42	0,85
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,07	1,85	3,90	3,27	3,44	0,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,05	5,54	9,34	9,05	9,39	0,15
J. Informasi dan Komunikasi	0,15	2,98	10,20	9,17	8,84	0,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,77	-7,61	10,23	0,12	7,09	0,16
L. Real Estat	1,29	3,32	8,81	8,91	8,17	0,27
M,N. Jasa Perusahaan	2,29	3,69	5,41	6,23	5,18	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,88	2,34	8,62	8,83	9,35	0,29
P. Jasa Pendidikan	0,05	9,98	6,41	9,43	6,76	0,17
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	9,52	4,29	13,62	7,34	0,05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,26	1,35	5,49	-0,05	4,12	0,03
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,47	-1,85	5,03	5,07	5,03	5,03

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dapat dilihat dari tabel tersebut di atas laju pertumbuhan Tahun 2024 untuk Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan sebesar 7,42 persen.

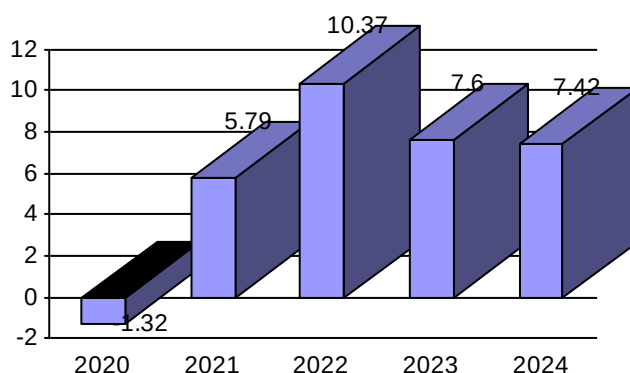
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan efisiensi perdagangan	1.1. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku	10,2% - 10,4%	7,6%	74,5%	9	7,42	82,44%

Berikut grafik perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2020 – 2024



Dapat dilihat pada grafik di atas pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 adalah sebesar 7,42 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, dimana sumber pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menurut Lapangan Usaha tahun 2024 adalah 0,85 persen.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Nasional

Laju Pertumbuhan PDB (Nasional) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 4,86 persen. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Lapangan Usaha	Triw III-2024 terhadap Triw II-2024 (Q-to-Q) ¹	Triw IV-2024 terhadap Triw III-2024 (Q-to-Q) ¹	Triw III-2024 terhadap Triw III-2023 (Y-on-Y) ²	Triw IV-2024 terhadap Triw IV-2023 (Y-on-Y) ²	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,10	-18,49	1,69	0,71	0,67	0,08
B. Pertambangan dan Penggalian	5,62	3,25	3,46	3,95	4,90	0,36
C. Industri Pengolahan	4,24	0,68	4,72	4,89	4,43	0,90
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,42	1,07	5,02	3,42	4,77	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,94	2,50	0,03	1,06	1,56	-0
F. Konstruksi	6,06	4,19	7,48	5,81	7,02	0,67
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,13	0,09	4,82	5,19	4,86	0,64
H. Transportasi dan Pergudangan	0,98	1,47	8,64	7,92	8,69	0,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,40	2,88	8,32	6,61	8,56	0,27
J. Informasi dan Komunikasi	0,51	2,35	6,82	7,45	7,57	0,50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,81	-0,91	5,49	1,74	4,74	0,19
L. Real Estat	1,41	0,93	2,32	2,97	2,50	0,07
M,N. Jasa Perusahaan	-0,06	2,32	7,93	8,08	8,38	0,16
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-16,87	16,63	3,94	1,16	6,40	0,20
P. Jasa Pendidikan	-6,41	14,94	2,56	2,95	3,75	0,11
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	6,19	7,65	5,20	8,11	0,11
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-1,01	8,40	9,95	11,36	9,80	0,19
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	1,50	-0,01	5,04	4,69	5,11	4,89
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	1,62	12,96	2,89	12,36	3,24	0,14
Produk Domestik Bruto (PDB)	1,50	0,53	4,95	5,02	5,03	5,03

Tabel 10. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB (Nasional)
Menurut Lapangan Usaha (persen)

Sumber : BPS

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional
1	Peningkatan efisiensi perdagangan	1.1. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku	7,42%	4,86%

Jika dibandingkan dengan realisasi Nasional, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Sumatera Selatan sebesar 7,42% berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 4,86%.

2. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Stabilitas Harga Barang serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Stabilitas Harga Barang	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤5	6,13	81,56

Perkembangan harga yang terus cenderung naik sangat mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya barang kebutuhan pokok, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan harga yang demikian tersebut diatas mengindikasikan yang demikian dapat merupakan indikator adanya kendala yang terjadi pada pasokan, sistem distribusi dan secara empiris permintaan meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok tahun 2024 realisasi sebesar 6,13%, mencapai target ≤5% sehingga capaiannya 81,56%.

Tabel 13. Perkembangan Harga rata-rata sembilan bahan pokok masyarakat di Ibukota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

No	Jenis Komoditi	Satuan	Harga rata-rata tahun 2023	Harga rata-rata tahun 2024	Perubahan	
					Rp	%
1.	BERAS					
	- Medium	Kg	13.055	13.061	6	0.05
	- Premium	Kg	14.345	14.343	-2	-0.01
2.	GULA PASIR	Kg	17.264	17.264	0	0.00
3.	MINYAK GORENG					

	- Kemasan Sederhana	Ltr	18.018	18.713	695	3.86
	- Tanpa merk (curah)	Ltr	15.105	15.009	-96	-0.64
4.	TEPUNG TERIGU					
	- Segitiga Biru	Kg	13.669	12.515	-1.154	-8.44
5.	DAGING					
	- Sapi Paha Belakang	Kg	126.110	131.529	5.419	4.30
	- Ayam broiler	Kg	34.903	33.551	-1.352	-3.87
6.	TELUR AYAM					
	- Ras	Kg	25.541	26.873	1.332	5.22
7.	CABE					
	- Cabe merah besar	Kg	39.459	38.641	-818	-2.07
	- Cabe merah keriting	Kg	43.603	42.545	-1.058	-2.43
	- Cabe rawit merah	Kg	45.045	44.871	-174	-0.39
	- Cabe rawit hijau	Kg	38.724	38.652	-72	-0.19
8	BAWANG					
	- Merah	Kg	32.416	31.954	-462	-1.43
	- Putih	Kg	36.594	36.585	-9	-0.02
9	KEDELAI	Kg	13.903	11.601	-2.302	-16.56

Kondisi pasar/distribusi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional kondisi harga, ketersediaan stok dan distribusi relatif stabil.

Komoditi yang mengalami Perubahan Harga pada Tahun 2023 dan 2024 :

- Beras Medium, Minyak Goreng Kemasan Sederhana, Daging Sapi, dan Telur Ayam mengalami kenaikan harga dikarenakan permintaan meningkat menjelang HBKN
- Komoditi lainnya seperti Gula Pasir tidak mengalami kenaikan/penurunan harga, sedangkan untuk komoditi Beras Premium, Minyak Goreng Curah, Terigu, Daging Ayam, Cabe, Bawang dan Kedelai mengalami Penurunan Harga.

Langkah antisipasi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2024:

- Melakukan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok setiap hari.
- Melakukan pemetaan dan proyeksi terhadap kebutuhan masyarakat serta ketersediaan stok, dalam rangka mengamankan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang bulan ramadhan dan hari raya idul fitri.
- Melaksanakan Pasar Murah pada menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

Stabilisasi harga terkait inflasi :

- Melaksanakan pasar murah
- Melaksanakan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan pedagang
- Melaksanakan Rapat Koordinasi distribusi sembako bersama Distributor/Agen dan Instansi Terkait dan Satgas Pangan

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stabilitas harga barang	1.1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	≤ 5%	4,7%	100%	≤ 5%	6,13%	81,56%

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok tahun 2024 sebesar 6,13%, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang realisasinya sebesar 4,7%.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian
1	Stabilitas harga barang	1.1.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	6,13%	5,9%	100%

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok tahun 2024 sebesar 6,1%, jika dibandingkan dengan standar nasional telah mencapai target 5,9% atau 100%.

3. Persentase penanganan pengaduan konsumen

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Meningkatkan perlindungan konsumen serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90	95,24	105,82

Jumlah pengaduan konsumen yang diterima oleh BPSK Kota Lubuk Linggau adalah sebesar 62 kasus, Jumlah pengaduan konsumen yang diterima oleh BPSK Kota Palembang adalah sebesar 12 kasus, Jumlah pengaduan konsumen yang diterima oleh Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 10 kasus. Jadi total pengaduan konsumen yang masuk di tahun 2024 adalah sebesar 84 kasus, yang diselesaikan adalah sebesar 80 kasus atau 95,24% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Mencapai target sebesar 105,82%.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	2.1. Persentase penanganan pengaduan konsumen	90%	94,90%	105,44%	90%	95,24	105,82

Realisasi tahun 2024 untuk persentase penanganan pengaduan konsumen jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dari 95,24% menjadi 94,90%. Tetapi target tetap tercapai.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	2.1.	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95,24%	92%	103,52%

Persentase penanganan pengaduan konsumen tahun 2024 sebesar 95,24% jika dibandingkan dengan target standar nasional 92% tetap mencapai target atau 103,52%.

4. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	70	23,17	33,1

Untuk persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah sebesar 23,17%, di mana di tahun 2024 jumlah produk yang dimonitoring adalah sebanyak 70 produk dari total 302 produk barang SNI yang wajib diawasi. Capaian kinerja sebesar 33,1% dari target yang ditetapkan.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	2.2. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	30%	42,05%	140,17%	70%	23,17%	33,1%

Realisasi tahun 2024 untuk Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan dari 42,05% menjadi 23,17%, dikarenakan anggaran perjalanan dinas yang defisiensi.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	2.2.	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	23,17%	55%	42,12%

Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tahun 2024 sebesar 23,17% jika dibandingkan dengan target standar nasional sebesar 55% tidak mencapai target atau hanya sebesar 42,12%.

5. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku

Kegiatan UPTD BPSMB Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu barang terhadap barang komoditi unggulan Sumatera Selatan terutama komoditi barang ekspor Sumatera Selatan sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tabel 22. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100	95,24	95,24

Jumlah sample yang masuk sebanyak 59 sample, terdiri dari 55 sample SIR, dan 4 sample kopi biji. Dari 59 sample yang masuk ada 2 sample yang tidak memenuhi ketentuan sehingga realisasi Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku tahun 2024 sebesar 95,24%. Capaiannya sebesar 95,24% dari target yang ditetapkan.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Meningkatnya perlindungan konsumen	2.1. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	98,41%	98,41%	100%	95,24%	95,24%

Realisasi tahun 2024 untuk Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan dari 98,41% menjadi 95,24%.

6. Neraca Perdagangan, Pertumbuhan Ekspor, Pertumbuhan Ekspor Non Migas

Neraca Perdagangan merupakan salah satu indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya investasi, industri dan perdagangan guna mencapai tujuan meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah. Neraca perdagangan atau *balance of trade* (BoT) ialah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang di ekspor dan di impor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional.

Neraca perdagangan dibuat agar suatu negara dapat mengetahui perkembangan perdagangan internasional yang dilakukan. Keadaan neraca perdagangan suatu negara ada tiga kemungkinan yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Neraca perdagangan disebut **surplus** jika nilai ekspor negara tersebut lebih besar daripada nilai impornya. Sebaliknya, neraca perdagangan disebut defisit jika nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Neraca perdagangan disebut seimbang jika nilai ekspornya sama dengan nilai impor.

Tabel 25. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Neraca Perdagangan, Pertumbuhan Ekspor, Pertumbuhan Ekspor Non Migas Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
3.Peningkatan kinerja ekspor	3.1 Neraca Perdagangan	US\$ Juta/Tahun	5.125	4.652,89	90,78%
	3.2 Persentase pertumbuhan ekspor	%	2,5%	2,09%	83,6%
	3.3 Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	2,5% - 5%	2,33%	107,29%

Target neraca perdagangan Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar US\$ 5.125 Juta, sedangkan realisasi neraca perdagangan Sumatera Selatan hingga bulan Desember 2024 yaitu US\$ 4.652,89 Juta atau sebesar 90,78%. Artinya periode Januari hingga Desember 2024 realisasi Neraca Perdagangan Sumatera Selatan belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi Neraca Perdagangan Sumatera Selatan sebesar US\$ 4.652,89 Juta tersebut bernilai positif yang juga berarti Sumatera Selatan mengalami *surplus* neraca perdagangan.

Untuk pertumbuhan ekspor tahun 2024 realisasi 2,09% dan untuk pertumbuhan ekspor non migas tahun 2024 realisasi 2,33%, tidak tercapai target, hal ini disebabkan karena realisasi ekspor di tahun 2024 tinggi. Nilai ekspor di tahun 2024 tinggi disebabkan harga batubara dan karet di pasar dunia tinggi, sehingga perubahan/pertumbuhan ekspor tahun 2024 angkanya menjadi positif.

Hingga Desember 2024 neraca perdagangan Sumatera Selatan telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena sejak adanya pandemi yang melanda seluruh negara-negara di dunia, negara-negara tujuan ekspor tersebut tidak lagi melakukan *lockdown*.

Realisasi Neraca Perdagangan Sumatera Selatan dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 26. Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (US\$ Juta)
I	Ekspor	6.723,04
	- Migas	458,10
	- Non Migas	6.264,94
II	Impor	2.097,15

	- Migas	29,32
	- Non Migas	2.067,83
III	Total Perdagangan	8.820,19
	- Migas	487,42
	- Non Migas	8.332,77
IV	Neraca Perdagangan	4.625,89
	- Migas	428,78
	- Non Migas	4.197,11

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 26 neraca perdagangan Sumatera Selatan hingga bulan November 2024 dapat kita lihat terjadi surplus neraca perdagangan sebesar US\$ 4.625,89 Juta karena nilai ekspor US\$ 6.723,04 Juta lebih besar dibandingkan nilai impor US\$ 2.067,83 Juta. Komponen neraca perdagangan terdiri dari barang migas dan non migas dengan total perdagangan sebesar US\$ 8.820,19 Juta yang berasal dari migas US\$ 487,42 Juta dan non migas US\$ 8.332,77 Juta.

Untuk nilai ekspor US\$ 6.723,04 Juta meliputi barang migas US\$ 458,10 Juta dan barang non migas US\$ 6.264,94 Juta. Sedangkan nilai impor US\$ 2.097,15 Juta terdiri dari US\$ 29,32 Juta barang migas dan US\$ 2.067,83 Juta barang non migas. Surplus neraca perdagangan sangat diharapkan oleh suatu negara termasuk Indonesia. Peranan ekspor sangat penting untuk menunjang neraca perdagangan dalam rangka pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan ekspor sangat terkait dengan tingkat daya saing dari komoditi-komoditi ekspor Sumatera Selatan.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan Kinerja Ekspor	3.1.	Neraca Perdagangan	2.953 juta US\$	5.421,12 juta US\$	183,58%	5.125 juta US\$	4.652,89 juta US\$	90,78%
		3.2	Persentase pertumbuhan ekspor	2,5%	-13,16%	-526%	2,5%	2,09%	83,6%

		3.3	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2,5% - 5%	-14,34%	-574%	2,5% - 5%	2,33%	107,29%
--	--	-----	------------------------------------	-----------	---------	-------	-----------	-------	---------

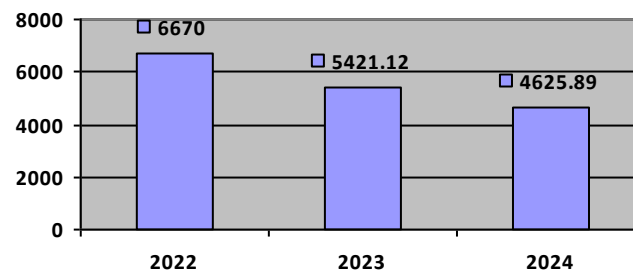
Perkembangan neraca perdagangan selama 3 tahun terakhir yaitu 2022, 2023 dan hingga Desember 2024, neraca perdagangan Sumatera Selatan di Tahun 2022 US\$ 6.668 juta dan di Tahun 2023 US\$ 5.421,12 juta, sedangkan neraca perdagangan Sumatera Selatan hingga Desember tahun 2024 menurun menjadi US\$ 4.652,89 juta. Tren neraca perdagangan Sumatera Selatan kurun waktu 2022 hingga Desember 2024 mengalami penurunan namun angka surplus neraca perdagangan tetap dirasakan, dimana nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11 dan terlihat lebih jelas dengan grafik.

Tabel 28. Neraca Perdagangan Sumatera Selatan
Periode 2022-2024

No.	URAIAN	Nilai : Juta US\$		
		2022	2023	2024
I.	Ekspor	7.583	6.585,52	6.723,04
	- Migas	436	463,15	458,10
	- Non Migas	7.147	6.122,37	6.264,94
II.	Impor	913	1.164,40	2.097,15
	- Migas	97	41,14	29,32
	- Non Migas	816	1.123,26	2.067,83
III.	Neraca	6.670	5.421,12	4.625,89
	- Migas	338	422,01	428,78
	- Non Migas	6.331	4.299,11	4.197,11

Sumber : BPS (Diolah oleh PDSI, Sekjen Kementerian Perdagangan)

Grafik 2. Neraca Perdagangan Sumatera Selatan
Periode 2022, 2023 dan 2024



Neraca perdagangan Sumatera Selatan Tahun 2022 Pandemi semakin perlahan-lahan berkurang sehingga negara-negara tujuan ekspor Sumatera Selatan tidak lagi menutup pintu masuk ke negaranya seiring juga dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang telah kian dapat mengatasi covid 19 walaupun belum juga dapat terbebas dari pandemi. Nilai ekspor Sumatera Selatan jauh meningkat di 2022 di sisi lain nilai impor Sumatera Selatan menurun dibandingkan tahun 2021. Sehingga tahun 2022 neraca perdagangan Sumatera Selatan bertambah dan meningkat menjadi US\$ 6.670 juta dibandingkan Tahun 2021 neraca perdagangan hanya US\$ 4.334 juta. Namun tahun 2023 hingga Desember turun menjadi US\$ 5.421,12 juta. Penurunan neraca perdagangan antara lain karena datang musim kemarau, kualitas dan kuantitas pasokan karet dan barang dari karet serta beberapa komoditi unggulan Sumatera Selatan menurun. Selain itu turunnya harga internasional beberapa komoditi ekspor unggulan Sumatera Selatan misalnya batubara dan karet serta komoditi lainnya.

Surplus neraca perdagangan tahun 2022 terdiri dari komponen migas sebesar US\$ 338 juta dan non migas US\$ 6.331 juta. Surplus neraca perdagangan tahun 2023 berasal dari komoditi migas US\$ 422,01 juta dan non migas US\$ 4.999,11 juta.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Nasional

Neraca Perdagangan Indonesia (Nasional) Tahun 2024 mengalami surplus sebesar US\$ 31.043,5 juta seperti dapat kita lihat tabel berikut :

Tabel 29. Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (US\$ Juta)
I	Ekspor	264.703,0
	- Migas	15.876,8
	- Non Migas	248.826,2
II	Impor	233.659,5
	- Migas	36.275,1
	- Non Migas	197.384,4
III	Total Perdagangan	498.362,5
	- Migas	52.151,9
	- Non Migas	446.210,6
IV	Neraca Perdagangan	31.043,5
	- Migas	-20.398,3
	- Non Migas	51.441,8

Sumber : BPS

Tabel 30. Perbandingan Capaian Kinerja Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Realisasi Sumatera Selatan	Realisasi Nasional
3	Peningkatan Kinerja Ekspor	3.1.	Neraca Perdagangan	4.625,89 Juta US\$	31.043,5 Juta US\$

Jika dibandingkan dengan Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2024, maka Neraca Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi sebesar 14,98 persen (US\$ 4.652,89 Juta / US\$ 31.043,5 Juta x 100%).

Daya saing yang tinggi akan meningkatkan kinerja ekspor pada akhirnya memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena lebih dari 80 persen ekspor Sumatera Selatan adalah ekspor non migas. Guna mencapai tujuan pembangunan daerah, maka salah satu kebijakan yang penting untuk dilakukan adalah melihat dan memprioritaskan potensi unggulan yang dimiliki Sumatera Selatan dengan memilih komoditas/sektor yang diunggulkan. Untuk hal tersebut Dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 31. Realisasi Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Selatan
Berdasarkan 10 Komoditi Unggulan Tahun 2024

No	Komoditi Ekspor Unggulan	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	Keterangan
1.	Bahan Bakar Mineral	2.604,02	Non Migas
2.	Karet dan Barang dari Karet	1.212,86	Non Migas
3.	Pulp dari Kayu	1.124,76	Non Migas
4.	Lemak & Minyak Hewan / Nabati	230,31	Non Migas
5.	Kertas/Karton	101,86	Non Migas
6.	Kayu, Barang dari Kayu	97,84	Non Migas
7.	Pupuk	56,94	Non Migas
8.	Residu, dan Sisa Industri Makanan	51,85	Non Migas
9.	Buah-buahan	42,36	Non Migas
10.	Bahan Kimia Anorganik	22,88	Non Migas

Pada Tabel 31. Realisasi Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Selatan berdasarkan 10 komoditi unggulan hingga bulan Desember 2024. Dimana secara keseluruhan, terdapat 61 jenis komoditi yang di ekspor oleh Sumatera Selatan. Komoditi tersebut antara lain; Bahan Bakar Mineral merupakan komoditi unggulan yang paling utama di Sumatera Selatan sebesar US\$ 2.604,02 Juta kemudian Karet dan Barang dari Karet US\$ 1.212,86 Juta. Pulp dari Kayu US\$ 1.124,76 Juta. Selanjutnya lemak dan minyak hewani/nabati US\$ 230,31 Juta, kertas/karton US\$ 101,86 Juta, kayu, barang dari kayu US\$ 97,84 Juta, pupuk US\$ 56,94 Juta, Residu dan Sisa industri makanan US\$ 51,85 juta, buah-buahan US\$ 42,36 Juta serta di urutan ke-10 berbagai bahan kimia anorganik sebesar US\$ 22,88 Juta.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil Batubara terbesar di Indonesia. Naik turunnya daya saing batubara berkaitan dengan volume produksi batu bara, Sumatera Selatan memiliki kekayaan berupa tambang batu bara cukup besar yakni di Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk meningkatkan nilai ekspor Sumatera Selatan juga sangat dibutuhkan upaya peningkatan daya saing komoditi-komoditi ekspor khususnya komoditi non migas. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan karet di Sumatera Selatan adalah dengan melakukan sinergitas diantara perkebunan rakyat dan perkebunan besar melalui pola plasma. Kerjasama tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajerial

petani, baik pada saat produksi maupun hingga saat pemasaran. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pemberian pendampingan ke petani untuk meningkatkan kemampuan produksinya ataupun didorong untuk melakukan peremajaan tanaman karet nya.

Permasalahan utama yang dialami petani karet saat ini adalah pada penyediaan bibit tanaman karet yang berkualitas. Melalui sistem pengelolaan plasma, diharapkan dapat memberikan solusi pada penyediaan bibit karet. Perusahaan besar dapat berkerjasama dengan Balai Penelitian untuk penyediaan bibit karet yang berkualitas, bibit karet berkualitas tersebut kemudian dapat disalurkan kepada petani-petani anggota plasma. Peningkatan kualitas bibit karet tersebut, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perkebunan karet saat ini.

Disamping pengelolaan lahan, optimalisasi disektor industri hilir karet juga perlu ditingkatkan. Hal tersebut terkait dengan masih rendahnya penyerapan hasil perkebunan karet oleh sektor industri pengolahan. Hanya sekitar 10-15% hasil produksi karet alam yang dipergunakan industri dalam negeri baik untuk industri ban, alas kaki, otomotif dan sarung tangan. Kondisi tersebut mengakibatkan produsen karet menitik beratkan hasil berupa karet mentah untuk kebutuhan ekspor. Hal ini disebabkan pemrosesan karet menjadi produk jadi masih sangat minim sehingga produk barang jadi karet untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih banyak diimpor. Sistem plasma juga diharapkan dapat membantu dalam pengadaan modal kerja dari pihak terkait baik perkebunan besar maupun perbankan. Dengan modal yang memadai, petani karet dapat lebih memperbaiki manajemen pengelolaan dan pemasaran secara terpadu.

Peningkatan ekspor sangat terkait dengan tingkat daya saing dari komoditi-komoditi ekspor tersebut. Daya saing yang tinggi akan meningkatkan kinerja ekspor yang pada akhirnya memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Berdasarkan data pada Neraca Perdagangan Sumatera Selatan, Kinerja Ekspor saat ini didominasi sekitar 80% Produk Komoditi non migas, sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Sumatera Selatan berupaya untuk meningkatkan kinerja ekspornya melalui upaya peningkatan daya saing komoditi - komoditi ekspor non migas Sumatera Selatan. Berikut ini adalah 10 (sepuluh) Negara tujuan utama Sumatera Selatan hingga Desember tahun 2024 :

Tabel 32. Negara Tujuan Ekspor Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor
1.	Tiongkok	2.233,00
2.	Malaysia	1.410,63
3.	India	701,79
4.	Korea Selatan	467,86
5.	Singapura	432,35
6.	Amerika Serikat	342,94
7.	Filipina	266,99
8.	Jerman	27,11
9.	Belanda	17,81
10.	Belgia	14,96

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Tiongkok mendominasi negara tujuan ekspor Sumatera Selatan, Malaysia di posisi kedua dan India ketiga. Selanjutnya Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat, Filipina, Jerman, Belanda dan Belgia untuk negara tujuan ekspor Sumatera Selatan. Sesungguhnya selama kurun waktu hingga Desember 2024 jumlah negara tujuan ekspor Sumatera Selatan sebanyak 98 negara yang tersebar di seluruh dunia.

7. Fluktuasi nilai impor

Kita telah ketahui bahwa komponen terbentuknya suatu neraca perdagangan bukan hanya ekspor tetapi juga impor. Sebagai provinsi yang sedang membangun, Sumatera Selatan juga membutuhkan produk impor untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai impor tidak lepas dari pengaruh permintaan Sumatera Selatan atas barang-barang konsumsi, bahan baku dan barang modal yang pasokannya belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh industri-industri dalam negeri. Karena sesungguhnya fungsi impor adalah untuk pengadaan bahan kebutuhan pokok (barang konsumsi), pengadaan bahan baku bagi industri di dalam negeri termasuk industri yang berorientasi ekspor dan pengadaan barang modal yang belum bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Fungsi lainnya adalah untuk merintis pasaran di dalam negeri, merangsang pertumbuhan industri baru dan perluasan industri yang sudah ada serta dalam rangka alih teknologi. Secara bertahap negara kita

mengembangkan teknologi modern yang nantinya akan mengurangi keteringgalan dan ketergantungan kita dengan negara-negara lain yang lebih maju.

Tabel 33. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fluktuasi Nilai Impor Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Efektifitas pengendalian impor	Fluktuasi nilai impor	%	< 20%	-41,10%	-21.1%

Target tahun 2024 untuk fluktuasi nilai impor adalah kurang dari 20%, realisasi tahun 2024 sebesar -41,10%, yang berarti capaiannya hanya -21,1%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 34. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Efektifitas pengendalian impor	4.1. Fluktuasi nilai impor	< 20%	27,44%	72,89%	< 20%	-41,10%	-21.1%

Realisasi tahun 2024 untuk Fluktuasi nilai impor jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan dari 27,44% menjadi minus 41,10%. Yang berarti nilai impor di tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024.

Kita dapat melihat tabel realisasi nilai impor Sumatera Selatan hingga Desember 2023 berdasarkan 10 (sepuluh) terbesar komoditi Impor Sumatera Selatan tahun 2023, yaitu :

Tabel 35. Realisasi Nilai Impor Sumatera Selatan Berdasarkan 10 Komoditi Tahun 2024

No	Barang Impor	Nilai Impor
1.	Mesin dan Peralatan Mekanis dan Bagiannya	1.376,49
2.	Mesin dan Perlengkapan Elektris serta Bagiannya	121,25
3.	Pupuk	87,79
4.	Barang dari Besi dan Baja	63,60
5.	Karet dan Barang dari Karet	62,87
6.	Kayu dan Barang dari Kayu	62,64
7.	Sereal	61,51

8.	Kereta Api, Trem dan Bagiannya	35,63
9.	Pulp dari Kayu	28,61
10.	Senjata dan Amunisi serta Bagiannya	27,83

Nilai impor Sumatera Selatan terus menurun sejak Agustus 2024, kemudian meningkat pada bulan November dan kembali menurun pada Desember 2024. Nilai impor mencapai US\$105,51 juta atau berkurang US\$71,33 juta (40,34 persen) dibanding November 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada impor komoditas nonmigas. Impor nonmigas berkurang hingga 41,75 persen sedangkan impor migas meningkat sebesar 20 persen. Hal ini juga serupa jika nilai impor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai impor juga menurun secara *y on y*. Impor di bulan Desember menurun 41 persen (*y on y*) karena berkurangnya impor non migas 43,22 persen. Sebaliknya nilai impor secara kumulatif meningkat hingga 80 persen. Hal ini disebabkan nilai impor non migas yang terus meningkat hingga 84 persen jika dibandingkan 2023. Dan jika dilihat dari distribusinya, impor nonmigas masih mendominasi yaitu sebesar 98 persen.

Selanjutnya disampaikan Data realisasi Impor Sumatera Selatan berdasarkan negara asal barang hingga Desember 2024, yaitu:

Tabel 36. Negara Asal Barang Impor ke Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	NEGARA ASAL	JUTA US\$
1	Tiongkok	1.225,72
2	Finlandia	243,96
3	Vietnam	107,85
4	Jerman	88,03
5	Malaysia	64,59
6	Thailand	53,25
7	Pantai Gading	47,88
8	Kanada	28,20
9	Austria	20,21
10	Australia	14,31
11	India	13,97
12	Amerika Serikat	13,04

Dari tabel tersebut dapat di lihat bahwa Tiongkok sebesar US\$ 1.225,72 juta, Finlandia US\$ 243,96 Juta, Vietnam US\$ 107,85 juta, Jerman US\$ 88,03 juta, Malaysia US\$ 64,59 juta, Thailand US\$ 53,25 juta, Pantai Gading US\$ 47,88 juta, Kanada US\$ 28,20 juta, Austria US\$ 20,21 juta, Australia US\$ 14,31 juta, India US\$ 13,97 juta dan Amerika Serikat US\$ 13,04 juta merupakan 12 negara asal barang-barang impor terbesar ke Sumatera Selatan. Hingga Desember Tahun 2024, terdapat 75 negara asal barang impor Sumatera Selatan.

III.1.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari periode Renstra 2024-2026, berikut disajikan tabel kemajuan capaian sasaran strategis :

Tabel 37. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5 x 100)
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	82,44	9	9,16
1	Stabilitas harga barang	1.1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	81,57	<5	16,31
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	2.1. Persentase penanganan pengaduan konsumen	95,24	90	105,82
		2.2. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	23,18	70	33,11
		2.3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	96,61	100	96,61
3	Peningkatan kinerja ekspor	3.1. Neraca perdagangan	90,26%	5.125	1,76
		3.2. Persentase pertumbuhan ekspor	111,14%	5.637	1,97
		3.3. Pertumbuhan nilai ekspor non migas	93,2	2,5-5	3,7
4	Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan	4.1 Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik	100	25	4

III.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

Berikut disajikan tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi :

Tabel 38. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	7	8	9	10	11
1	Stabilitas harga barang	1.1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	<5	6,13	81,57	Kerjasama Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam mengatasi gejolak harga	Tetap koordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	2.1. Persentase penanganan pengaduan konsumen	90	$80/84 \times 100 = 95,24$	95,24	Didukung BPSK Kota Palembang dan BPSK Kota Lubuk Linggau	Operasional BPSK tetap dianggarkan
		2.2. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	70	$70/302 \times 100 = 23,18$	23,18	Didukung oleh SDM PPNS dan anggaran	Tetap dianggarkan untuk pengawasan
		2.3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	$57/59 \times 100 = 96,61$	96,61	Didukung oleh SDM Penguji mutu barang dan anggaran	Tetap dianggarkan untuk lab pengujian
3	Peningkatan kinerja ekspor	3.1. Neraca perdagangan	5.125	4.625,89	90,26%	Komoditi ekspor Sumsel pada umumnya masih berupa produk primer	Hilirisasi produk unggulan daerah
		3.2. Persentase pertumbuhan ekspor	5.637	6.264,94	111,14%		
		3.3. Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2,5-5	2,33	93,2		
4	Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan	4.1 Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik	25	25	100	-	-

III.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 39. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Stabilitas harga barang	1.1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	100%	Menunjang
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	100%	Menunjang
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	100%	Menunjang
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	Menunjang
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	100%	Menunjang
				Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Menunjang
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	92,40%	Menunjang
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	2.1. Persentase penanganan pengaduan konsumen	90%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1). Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2). Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	1) 90 2) 70 3) 100	Menunjang
				Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1. Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif 2. Jumlah orang yang di edukasi	95,24%	Menunjang

		2.2. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	70%	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	23,18%	Menunjang
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tertib Usaha	100%	
				Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	91,85%	Menunjang
		2.3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	96,61%	Menunjang
				Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	99,86%	Menunjang
				Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	98,80%	Menunjang
				Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Potensial yang Dipantau	99,28%	Menunjang
3	Peningkatan kinerja ekspor	3.1. Neraca perdagangan	90,26%	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	111,14%	Menunjang
		3.2. Persentase pertumbuhan ekspor	111,14 %	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	98,65%	Menunjang
		3.3. Pertumbuhan nilai ekspor non migas	93,2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	100%	Menunjang
4	Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan	4.1. Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan	100%	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	100%	Menunjang

III.2 Realisasi Anggaran

III.2.1 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD Tahun 2024

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan APBD Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik. Untuk Tahun 2024 pagu dana Belanja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 12.916.402.192,- yang terdiri dari 6 Program dan 15 Kegiatan serta 32 Sub Kegiatan. Realisasi Keuangan Belanja Langsung Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.160.371.719,- atau 94,15% dan realisasi fisik 94,70%.

Tabel 40. Capaian Anggaran Program Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1		2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		11.155.972.192	10.437.893.345	93,56
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.000.000	121.254.688	97,79
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	52.257.014	95,01
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	9.000.000	100
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	60.000.000	59.997.674	100
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.253.636.887	8.570.074.700	92,61
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.134.296.887	7.480.586.700	91,96
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	925.040.000	909.038.000	98,27
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.300.000	180.450.000	92,87
	III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.580.000	3.580.000	100
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.580.000	3.580.000	100
	IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000	160.000.000	100
	8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.000	160.000.000	100
	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.578.705	618.970.267	99,58
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.840.000	99,36
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.393.360	59.066.150	99,45
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	100
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	15.000.000	14.991.000	99,94
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.185.345	490.073.117	99,57
	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	149.800.000	99,87

	14	Pengadaan Mebel	50.000.000	49.900.000	99,80
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	99.900.000	99,90
	Vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.176.600	329.791.386	93,38
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	100
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.176.600	275.180.186	92,91
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000	47.611.200	95,22
	Viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.000.000	484.422.304	98,86
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.000.000	274.473.554	98,03
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	59.948.750	99,91
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	100
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		50.000.000	45.922.980	91,85
	IX	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	50.000.000	45.922.980	91,85
	22	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	50.000.000	45.922.980	91,85
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		500.000.000	495.910.000	99,18
	X	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	500.000.000	495.910.000	99,18
	23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	500.000.000	495.910.000	99,18
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		200.000.000	198.220.530	99,11
	XI	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	200.000.000	198.220.530	99,11
	24	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000	48.620.530	97,24
	25	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000	149.600.000	99,73
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		279.730.000	277.430.464	99,18

	XII	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	279.730.000	277.430.464	99,18
	26	Pameran Dagang Internasional / Nasional	170.000.000	167.700.464	98,65
	27	Pameran Dagang Lokal	109.730.000	109.730.000	100
VI		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	730.700.000	704.994.400	96,48
	XIII	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	455.700.000	433.346.232	95,09
	28	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	455.700.000	433.345.232	95,09
	XIV	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	223.487.168	99,33
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi	100.000.000	99.863.000	99,86
	30	Pengembangan Layanan Pengujian	100.000.000	98.804.488	98,80
	31	Pemantauan Mutu Produk	25.000.000	24.819.680	99,28
	XV	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.161.000	96,32
	32	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	50.000.000	48.161.000	96,32
		Jumlah : 32 sub kegiatan	12.916.402.192	12.160.371.719	94,15

Rincian realisasi per program kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Dana	:	Rp. 55.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.01.01
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Hasil	:	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Kinerja	:	1 laporan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 55.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.257.014,- atau 95,01% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.742.986,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan Sumatera Selatan sebanyak 1 kali.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	2
Nama Sub Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pagu Dana	:	Rp. 9.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.01.06
Keluaran	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil	:	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target Kinerja	:	3 laporan (LKIP, LPPD, LKPJ)

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp. 9.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	3
Nama Sub Kegiatan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu Dana	:	Rp. 60.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.01.07
Keluaran	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil	:	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Kinerja	:	1 laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 60.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.997.674,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.326,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan sarana prasarana perdagangan tahun 2024 ke Kabupaten/Kota (Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Pagaralam, PALI, OKI, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau, OKU, OKUT).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	4
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Dana	:	Rp. 8.134.296.887,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.02.01
Keluaran	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil	:	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Target Kinerja	:	714 orang/bulan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu Rp. 8.134.296.887,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 91,96% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.480.586.700 atau 91,96 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 653.710.187,-. Hasil yang

dicapai adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 714 OB untuk 51 orang selama bulan Januari s.d Desember 2024.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	5
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pagu Dana	:	Rp. 925.040.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.02.02
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Hasil	:	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target Kinerja	:	1 dokumen

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu Rp. 925.040.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 909.038.000,- atau 98,270% dengan sisa pagu anggaran Rp. 16.002.000,-. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa tenaga honorer selama bulan Januari s.d Desember 2024.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	6
Nama Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pagu Dana	:	Rp. 194.300.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.02.03
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Hasil	:	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Target Kinerja	:	12 dokumen

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu Rp. 194.300.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.450.000,- atau 92,87% dengan sisa pagu anggaran Rp. 13.850.000,-. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan selama bulan Januari s.d Desember 2024.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	7
Nama Sub Kegiatan	:	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pagu Dana	:	Rp. 3.580.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.03.06
Keluaran	:	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Hasil	:	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu Rp. 3.580.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.580.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	8
Nama Sub Kegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pagu Dana	:	Rp. 160.000.000,-
Lokasi	:	Palembang

Kode Rekening	:	3.30.01.1.05.09
Keluaran	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Hasil	:	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Target Kinerja	:	1 Paket

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu Rp. 160.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp.160.000.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp.0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya paket Pakaian Dinas untuk 47 pegawai ASN dan 36 pegawai non ASN Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	9
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Dana	:	Rp. 25.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.01
Keluaran	:	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Target Kinerja	:	4 paket

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu Rp. 25.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 24.840.000,- atau 99,45%,- dengan sisa pagu anggaran Rp.

160.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 Paket komponen instalasi listrik/penerangan untuk Dinas dan UPTD selama bulan Januari s.d Desember 2024.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	10
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Dana	:	Rp. 59.393.360,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.04
Keluaran	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Target Kinerja	:	4 paket

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu Rp. 59.393.360,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 59.066.150,- atau 99,45%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 327.210,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 paket alat tulis kantor dan alat kebersihan dan bahan pembersih selama bulan Januari s.d Desember 2024.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	11
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu Dana	:	Rp. 30.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.05
Keluaran	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Target Kinerja	:	4 paket

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 paket barang cetak dan penggandaan selama bulan Januari s.d Desember 2024.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	12
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
Pagu Dana	:	Rp. 15.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.06
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Target Kinerja	:	3.650 dokumen

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu Rp.15.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 14.991.000,- atau 99,94%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 9.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan sebanyak 3.650 Eksemplar selama bulan Januari s.d Desember 2024.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	13
Nama Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Dana	:	Rp. 492.185.345,-
Lokasi	:	Dalam dan Luar Provinsi dan Luar Negeri
Kode Rekening	:	3.30.01.1.06.09
Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Hasil	:	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

		dan Konsultasi SKPD
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu Rp. 492.185.345,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 490.073.117,- atau 99,57%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.112.338,- Hasil yang dicapai terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah untuk Dinas dan UPTD selama bulan Januari s.d Desember 2024.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	16
Nama Sub Kegiatan	:	Pengadaan Mebel
Pagu Dana	:	Rp. 50.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.07.01
Keluaran	:	Jumlah Paket Mebel Kantor yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan
Target Kinerja	:	1 Paket

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pengadaan Mebel dengan pagu Rp. 50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 49.900.000,- atau 99,80%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 100.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya 1 paket mebel kantor yang disediakan untuk Dinas dan UPTD;

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	17
Nama Sub Kegiatan	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Dana	:	Rp. 100.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.07.06
Keluaran	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Hasil	:	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Target Kinerja	:	12 unit

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 99.900.000,- atau 99,90%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 100.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya 12 unit peralatan dan mesin kantor yang disediakan untuk Dinas dan UPTD;

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	18
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Dana	:	Rp. 7.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.08.01
Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu Rp. 7.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,- Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat selama bulan Januari s.d Desember 2024;

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	19
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Dana	:	Rp. 296.176.600,-

Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.08.02
Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu Rp. 296.176.600,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 275.180.186,- atau 92,91% dengan sisa pagu anggaran Rp. 20.996.414,- Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa telepon, air, listrik, internet selama bulan Januari s.d Desember 2024.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	20
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Dana	:	Rp. 50.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.08.04
Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Hasil	:	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu Rp.50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 95,22% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.611.200,- atau 95,22% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.388.800,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu selama bulan Januari s.d Desember 2024.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	21
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pagu Dana	:	Rp. 280.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.09.01
Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Hasil	:	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Target Kinerja	:	144 Unit/Tahun (R4=10 unit, R2=2 unit / bulan)

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu Rp. 280.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 274.473.554,- atau 98,03% dengan sisa pagu anggaran Rp. 5.526.446,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya 11 unit kendaraan dinas roda empat dan 4 unit kendaraan dinas roda dua selama bulan Januari s.d Desember 2024;

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	22
Nama Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Dana	:	Rp. 60.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.09.06
Keluaran	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Hasil	:	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target Kinerja	:	50 unit
----------------	---	---------

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp.60.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.948.750,- atau 99,91% dengan sisa pagu anggaran Rp. 51.250,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya Peralatan dan Mesin selama bulan Januari s.d Desember 2024;

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	23
Nama Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Dana	:	Rp. 150.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.01.1.09.09
Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Hasil	:	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Target Kinerja	:	1 gedung

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu Rp. 150.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor Dinas Perdagangan.

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

a. Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Pagu Dana	:	Rp. 50.000.000,-

Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.02.1.03.03
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Hasil	:	Tersedianya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dengan pagu Rp.50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 93,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.922.980,- atau 91,85% dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.077.020,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya sebanyak 1 laporan

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Pagu Dana	:	Rp. 500.000.000,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.03.1.01.01
Keluaran	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Hasil	:	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
Target Kinerja	:	1200 unit

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dengan pagu Rp.500.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 495.910.000,- atau 99,18% dengan

siswa pagu anggaran Rp. 4.090.000,-. Hasil yang dicapai adalah 452 Unit bantuan sarana dan prasarana perdagangan berupa Tenda Lipat dan Timbangan Standar.

4. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
Pagu Dana	:	Rp. 50.000.000,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.04.1.02.01
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
Hasil	:	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
Target Kinerja	:	12 laporan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota dengan pagu Rp.50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.620.530,- atau 97,24% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.379.470,-. Hasil yang dicapai laporan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting bulan Januari s/d Desember 2024.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	2
Nama Sub Kegiatan	:	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah

		Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pagu Dana	:	Rp. 150.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.04.1.02.02
Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Hasil	:	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Target Kinerja	:	6 laporan

✓ Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 150.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.600.000,- atau 99,73% dengan sisa pagu anggaran Rp. 400.000,- . Hasil yang dicapai terlaksananya operasi pasar sebanyak 6 kali.

5. Program Pengembangan Ekspor

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

➤ Parameter Sub Kegiatan

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pameran Dagang Internasional / Nasional
Pagu Dana	:	Rp. 170.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.05.1.01.01
Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
Hasil	:	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/ Nasional
Target Kinerja	:	2 kali

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pameran Dagang Internasional / Nasional dengan pagu Rp.170,000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 167.700.464,- atau 98,65% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.299.536,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pameran sebanyak 2 kali di Jakarta (pameran TEI) dan Batam (Pameran INDOVEC Expo 2024).

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	2
Nama Sub Kegiatan	:	Pameran Dagang Lokal
Pagu Dana	:	Rp. 109.730.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.05.1.01.02
Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal
Hasil	:	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal
Target Kinerja	:	3 pelaku usaha

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pameran Dagang Lokal dengan pagu Rp. 109.730.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.730.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pameran Sriwijaya Expo sebanyak 1 (satu) kali di Palembang.

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
Pagu Dana	:	Rp. 455.700.000,-

Lokasi	:	Palembang, Lubuk Linggau
Kode Rekening	:	3.30.06.1.01.01
Keluaran	:	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif
Hasil	:	Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
Target Kinerja	:	2 BPSK

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 455.700.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini 95,09% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 433.346.232,- atau 95,09% dengan sisa pagu anggaran Rp. 22.353.768,-. Hasil yang dicapai terfasilitasinya 2 BPSK dan terlaksananya edukasi konsumen cerdas kepada 100 orang.

b. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Pengembangan Layanan Kalibrasi
Pagu Dana	:	Rp. 100.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.06.1.02.03
Keluaran	:	Jumlah Sertifikat Kalibrasi Produk yang Diterbitkan
Hasil	:	Meningkatnya layanan kalibrasi
Target Kinerja	:	1 dokumen

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pengembangan Layanan Kalibrasi dengan pagu Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.863.000,- atau 99,86% dengan sisa pagu anggaran Rp. 137.000,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan pengembangan layanan kalibrasi.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	2
Nama Sub Kegiatan	:	Pengembangan Layanan Pengujian
Pagu Dana	:	Rp. 100.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.06.1.02.03
Keluaran	:	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan
Hasil	:	Meningkatnya layanan sertifikasi
Target Kinerja	:	1 sertifikat

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pengembangan Layanan Pengujian dengan pagu Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.804.488,- atau 98,80% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.195.512,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan untuk sertifikasi laboratorium pengujian mutu yang terakreditasi oleh KAN sebanyak 1 dokumen.

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	3
Nama Sub Kegiatan	:	Pemantauan Mutu Produk
Pagu Dana	:	Rp. 25.000.000,-
Lokasi	:	Palembang
Kode Rekening	:	3.30.06.1.02.03
Keluaran	:	Jumlah Sertifikat Kalibrasi Produk yang Diterbitkan
Hasil	:	Meningkatnya layanan kalibrasi
Target Kinerja	:	1 dokumen

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Pemantauan Mutu Produk dengan pagu Rp. 25.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.819.680,- atau

99,28% dengan sisa pagu anggaran Rp. 180.320,-. Hasil yang dicapai adalah terpantaunya 3 komoditi yang terawasi mutu produknya sesuai standar mutu.

c. Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

➤ **Parameter Sub Kegiatan**

Nomor Urut	:	1
Nama Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
Pagu Dana	:	Rp. 50.000.000,-
Lokasi	:	Sumatera Selatan
Kode Rekening	:	3.30.06.1.03.01
Keluaran	:	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi
Hasil	:	Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan
Target Kinerja	:	1 Laporan

✓ **Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,32% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.161.000,- atau 96,32% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.839.000,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen selama bulan Januari s.d Desember 2024.

III.2.2 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN Tahun 2024

Untuk dana APBN Dinas Perdagangan memiliki 2 program. Adapun untuk sektor Perdagangan mendapat alokasi dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Bidang Perdagangan Luar Negeri. Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 177.698.000,-. Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi APBN Tahun 2024 adalah Rp.

112.194.282,- atau 63,14% dan realisasi fisik 63,14%, sedangkan Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 164.203.000,-. Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2024 adalah Rp. 120.910.450,- atau 73,63% dan realisasi fisik 73,63%

Tabel 41. Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2024

K/L/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Keuangan	Fisik
DANA DEKONSENTRASI			
Program Perdagangan Dalam Negeri	85.236.000		
• Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Bapokting	29.980.000	26.120.000	87,12
• Dukungan Administrasi Satker	55.256.000	53.824.282	97,41
Program Perdagangan Luar Negeri	92.462.000	0	0
• Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Daerah Terkait Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri	20.822.000	0	0
• Layanan Perkantoran	71.640.000	32.250.000	45,02
TOTAL	177.698.000	112.194.282	63,14

K/L/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Keuangan	Fisik
DANA TUGAS PEMBANTUAN			
Program Perdagangan Dalam Negeri	164.203.000		
• Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah	40.000.000	0	0
• Perlindungan Konsumen di Daerah	97.203.000	93.910.450	96,61
• Pelatihan Pelaporan Distribusi Bapokting	27.000.000	27.000.000	100
TOTAL	164.203.000	120.910.450	73,63

III.2.3 Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun 2023 Dibandingkan Tahun 2023

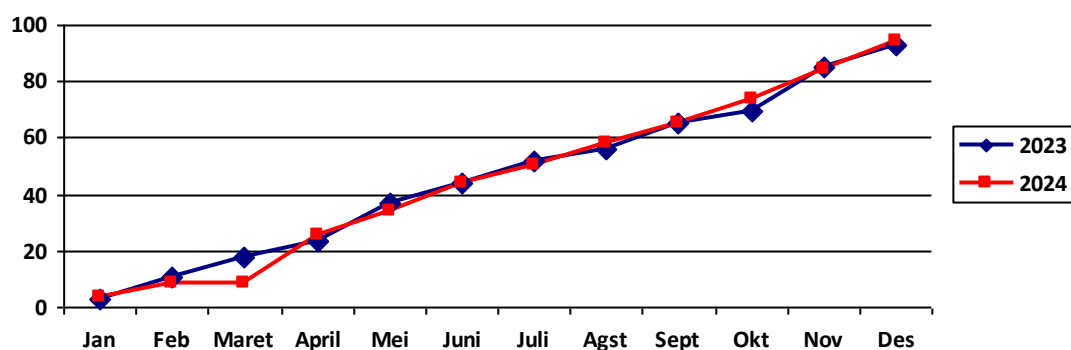
Untuk tahun anggaran 2023 ini pagu Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah Rp. 20.361.503.572,-. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 18.898.870.198,- atau 92,82% dan realisasi fisik 97,30%, dimana rincian realisasi per bulan dapat dilihat pada tabel dengan perbandingan realisasi anggaran di tahun 2022 lalu sebagai berikut :

Tabel 42. Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 dan 2024

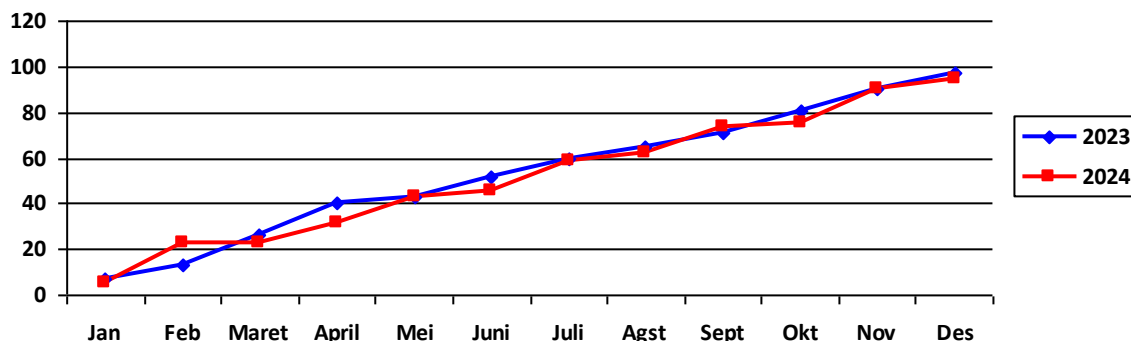
Bulan	Realisasi Keuangan dan Fisik			
	2023	2024	2023	2024
	Keuangan %	Keuangan %	Fisik %	Fisik %
Januari	3,14	3,55	6,79	5,14
Februari	10,73	8,84	13,53	22,43
Maret	17,40	8,84	25,96	22,43
April	23,64	25,81	40,54	31,59
Mei	36,83	33,71	43,15	43,33
Juni	43,93	44,14	51,41	45,37
Juli	51,94	50,58	59,40	58,70
Agustus	56,07	58,14	64,94	62,28
September	65,20	65,30	70,60	73,62
Oktober	69,76	73,51	80,82	75,71
Nopember	85,13	84,18	89,88	90,58
Desember	92,82	94,15	97,30	94,70

Realisasi tahun 2024 menunjukkan kestabilan karena Grafik perbandingan realisasi belanja Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3. Grafik Realisasi Keuangan Tahun 2022 dan 2023



Gambar 4. Grafik Realisasi Fisik Tahun 2022 dan 2023



Realisasi keuangan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, kenaikan sebesar 1,33 %. Untuk realisasi fisik pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, penurunan sebesar 3,00 %.

III.2.4 Realisasi Program/Kegiatan APBN Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023

Untuk pelaksanaan program/kegiatan APBN Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik. Pada Tahun 2024 pagu dana berjumlah Rp. 341.900.000,-. Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN Tahun 2024 adalah Rp. 233.104.732,- atau 68,18 % dan realisasi fisik 68,18 %. Perbandingan kinerja APBN Tahun 2024 dengan APBN Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43. Perbandingan Capaian Kinerja Dana APBN Tahun 2023 – 2024

No	Uraian	TA 2023	TA 2024	Ket
1.	Pagu Dana APBN (Rp)	679.900.000	341.901.000	2 program
2.	Realisasi APBN (Rp)	481.673.338	233.104.732	2 program
3.	% Capaian	96,58	68,18	

Dari tabel di atas dapat dilihat kinerja pelaksanaan program kegiatan dana APBN pada tahun 2024 turun dari kinerja APBN Tahun 2023. Berikut adalah rincian realisasi fisik – keuangan per program Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 :

Tabel 44. Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBN Tahun 2023 – 2024

Uraian	Realisasi Keuangan dan Fisik			
	2023	2024	2023	2024
	Keuangan %		Fisik %	

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	98,73	80,52	98,73	80,52
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	88,88	45,02	88,88	45,02
Total	96,58	68,18	96,58	68,18

Dana APBN untuk Dinas Perdagangan berasal dari Kementerian Perdagangan terdiri dari 2 program. Dari Tabel di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran dan realisasi fisik per program pada tahun 2024 turun bila dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2023 yang lalu.

III.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai. Berikut tabel yang menunjukkan tingkat efisiensi dan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran dan anggaran program dan kegiatan :

Tabel 45. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	Terkendalinya Keterjangkauan Harga	≤ 5%	6.13%	81,57%	200,000,000	198,220,530	99.11	0.89
2	Meningkatnya perlindungan konsumen dan Pengawasan Perdagangan	90%	95.24%	95,24%	730,700,000	704,984,400	96.48	3.52
		70%	23.18%	23,18%				
		100%	96,61%	96,61%				
3	Meningkatnya Ekspor Non	5,125	4,625.89	90.26%	279,730,000	277,430,464	99.18	0.82

	Migas Luar Negeri	5,637	6,264.94	111%				
		2,5% - 5%	2.33%	93%				
4	Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan	< 25%	25.00%	100.00%	500,000,000	495,910,000	99.18	0.82

Tabel 47. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100% terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100% terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	11.155.972.192	10.437.893.345	93,56	6,44
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berke mbang	100% Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkem bang	100	124.000.000	121.254.688	97,79	2,21
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100	55.000.000	52.257.014	95,01	4,99
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan (LPPD, LKPJ, LKIP)	3 Laporan (LPPD, LKPJ, LKIP)	100	9.000.000	9.000.000	100	0
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Laporan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	60.000.000	59.997.674	100	0
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% Administrasi Keuangan yang Terlayani	96,52% Administrasi Keuangan yang Terlayani	100	9.253.636.887	8.570.074.700	92,61	7,39
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	714 OB untuk 51 orang	714 OB untuk 51 orang	100	8.134.296.887	7.480.586.700	91,96	8,04
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	925.040.000	909.038.000	98,27	1,73
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	100	194.300.000	180.450.000	92,87	7,13
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100% Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	100% Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	100	3.580.000	3.580.000	100	0

	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	3.580.000	3.580.000	100	0
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100% Administrasi Kepegawaian yang Meningkat	100% Administrasi Kepegawaian yang Meningkat	100	160.000.000	160.000.000	100	0
	8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	160.000.000	160.000.000	100	0
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	100% Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	100	621.578.705	618.970.267	99,58	0,42
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	25.000.000	24.840.000	99,36	0,64
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	59.393.360	59.066.150	99,45	0,55
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket Barang Cetak dan Penggandaan	100	30.000.000	30.000.000	100	0
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3650 Exemplar ahan Bacaan	3650 Exemplar ahan Bacaan	100	15.000.000	14.991.000	99,94	0,06
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	492.185.345	490.073.117	99,57	0,43
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	92,95% Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100	150.000.000	149.800.000	99,87	0,13
	14	Pengadaan Mebel	1 Paket Mebel Kantor	1 Paket Mebel Kantor	100	50.000.000	49.900.000	99,80	0,2
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	32 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100.000.000	99.900.000	99,90	0,1
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	100% Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	100	353.176.600	329.791.386	93,38	6,62
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7.000.000	7.000.000	100	0

	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	296.176.600	275.180.186	92,91	7,09
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan Pelayanan Umum Kantor	100	50.000.000	47.611.200	95,22	4,78
	Vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100% Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100	490.000.000	484.422.304	98,86	1,14
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144 Unit/Tahun (R4=10 unit, R2=2 unit) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	144 Unit/Tahun (R4=10 unit, R2=2 unit) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	280.000.000	274.473.554	98,03	1,97
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	60.000.000	59.948.750	99,91	0,09
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100	150.000.000	150.000.000	100	0

II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Tertib Usaha 55%	Tertib Usaha 100%	100	50.000.000	45.922.980	91,85	8,15
	i	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	50 pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	50 pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	100	50.000.000	45.922.980	91,85	8,15
	22	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	100	50.000.000	45.922.980	91,85	8,15

III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		452 unit sarana dan prasarana Perdagangan	452 unit sarana dan prasarana Perdagangan	100	500.000.000	495.910.000	99,18	0,82
	i	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	452 unit sarana dan prasarana Perdagangan	452 unit sarana dan prasarana Perdagangan	100	500.000.000	495.910.000	99,18	0,82
	23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	452 unit sarana dan prasarana Perdagangan	452 unit sarana dan prasarana Perdagangan	100	500.000.000	495.910.000	99,18	0,82

IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok $\leq 5\%$	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok $\leq 5\%$	100	200.000.000	198.220.530	99,11	0,89
	i	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok $\leq 5\%$	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok $\leq 5\%$	100	200.000.000	198.220.530	99,11	0,89
	24	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	12 Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	100	50.000.000	48.620.530	97,24	2,76
	25	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok	6 Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok	100	150.000.000	149.600.000	99,73	0,27
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan nilai ekspor non migas = 2,4%-5%	Pertumbuhan nilai ekspor non migas = -2,5-5%	100	279.730.000	277.430.464	99,18	0,19
	i	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan sebanyak 3 kali	Penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan sebanyak 3 kali	100	279.730.000	277.430.464	99,18	0,19
	26	Pameran Dagang Internasional / Nasional	3 Pelaku Usaha ang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha ang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	100	170.000.000	167.700.464	98,65	1,35
	27	Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	100	109.730.000	109.730.000	100	0

VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		1). 90% Penanganan Pengaduan Konsumen 2). 100% komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 3). 70% barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	1). 94,90% Penanganan Pengaduan Konsumen 2). 98,41% komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 3). 42,05% barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	100	730.700.000	704.994.400	96,48	3,52
	i	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	90% Penanganan Pengaduan Konsumen	94,90% Penanganan Pengaduan Konsumen	100	455.700.000	433.346.232	95,09	4,91
	28	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1. 2 BPSK difasilitasi	1. 2 BPSK difasilitasi	100	455.700.000	433.346.232	95,09	4,91
	ii	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100% komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	98,41% komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	225.000.000	223.487.168	99,33	0,67
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi	1 Dokumen yang Diterbitkan	1 Dokumen yang Diterbitkan	100	100.000.000	99.863.000	99,86	0,14
	30	Pengembangan Layanan Pengujian	1 Sertifikat yang Diterbitkan	1 Sertifikat yang Diterbitkan	100	100.000.000	98.804.488	98,80	1,20
	31	Pemantauan Mutu Produk	3 Produk yang Dipantau	3 Produk yang Dipantau	100	25.000.000	24.819.680	99,28	0,72
	iii	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	30% Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	42,05% Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	100	50.000.000	48.161.000	96,32	3,68
	32	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1 Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	1 Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	100	50.000.000	48.161.000	96,32	3,68
Jumlah : 32 sub kegiatan					100	12.916.402.192	12.160.371.719	94,15	5,85

BAB IV

P E N U T U P

IV.1 KESIMPULAN

Dari semua yang telah diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2024 berlangsung baik dengan realisasi keuangan mencapai 94,15% dan secara fisik mencapai 94,70%. Pelaksanaan kinerja keuangan program kegiatan tahun 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 lalu yang mencapai 92,82% untuk realisasi keuangan. Untuk realisasi fisik mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 97,30%.
2. Pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBN tahun 2024 berlangsung cukup baik dengan realisasi keuangan mencapai 68,18% dan secara fisik mencapai 68,18%. Pelaksanaan kinerja program kegiatan APBN tahun 2024 ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 yang mencapai 96,58% untuk realisasi keuangan dan fisik mencapai 96,58%. Secara umum pelaksanaan program kegiatan APBN tahun 2024 tidak terkendala hal-hal yang berarti, tetapi tetap harus ditingkatkan kinerjanya di tahun mendatang.
3. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melalui pencapaian beberapa indikator kinerja secara umum cukup baik.
4. Dalam pencapaian visi dan misi SKPD yang tertuang dalam tujuan-sasaran-strategi-kebijakan dan indikator kinerja yang ditetapkan serta implementasinya dalam bentuk program kegiatan sudah berjalan cukup baik sepanjang tahun 2023, dengan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan antara lain :
 - Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa (PBBJ) dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan konsumen.
 - Memantau perkembangan harga, ketersediaan stock dan distribusi barang kebutuhan pokok maupun strategis di Kabupaten/Kota.

- Meningkatkan pelayanan pengujian dan pengawasan standar mutu menambah laboratorium pengujian sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta merekrut SDM untuk pengujian mutu barang.
- Melakukan upaya peningkatan ekspor terutama komoditi unggulan daerah, upaya pengendalian impor serta menggalakkan penggunaan produksi dalam negeri.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya menarik minat investor untuk berusaha (menanamkan investasi) dibidang perdagangan.

IV.2 SARAN

Dari semua yang telah diuraikan didalam LKIP Tahun 2024, beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Penanganan permasalahan yang ada disektor Perdagangan memerlukan koordinasi dan perencanaan yang baik, efektif dan realitis dengan didukung data yang akurat serta komitmen dari pimpinan dan seluruh komponen yang ada didalam SKPD.
2. Perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM/aparatur Dinas Perdagangan agar dapat memenuhi/menjalankan tuposinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Evaluasi terhadap struktur organisasi dan komposisi aparatur didalam organisasi perlu dilakukan, mengingat bahwa penempatan aparatur yang tepat pada posisi-posisi yang tepat dan strategis sangat menentukan hasil pencapaian kinerja dan pelayanan SKPD.

Akhirnya semoga apa yang telah diuraikan dalam LKIP tahun 2024 ini dapat menggambarkan apa yang menjadi harapan dari tujuan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.